

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir di semua negara kini sedang menghadapi masalah mulai dari pemanasan global, bencana alam, bencana akibat perbuatan manusia hingga masalah kebutuhan manusia yang terkait dengan persediaan kekayaan alam. Di negara berkembang seperti Indonesia yang padat penduduknya, masalah seperti itu menjadi sangat kompleks. Apalagi masalah tersebut kemudian menjadi terkait dengan berbagai aspek baik ekonomi, politik, administrasi, teknologi, kesehatan dan lain sebagainya.

Pada era globalisasi ini, pemerintah perlu menangani masalah yang muncul di bidang pertanian, perikanan, peternakan serta pengelolaan hasil hutan mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil bumi. Maka kewajiban bagi kita semua untuk menjaga dan melestarikan semua hal tersebut. Pemerintah juga harus berperan mengingat hasil hutan dan pertanian yang melimpah. Sehingga penggunaannya tetap diawasi dan digunakan sebaik-baiknya agar tidak habis dengan sia-sia serta tidak menyebabkan kekurangan sumber daya bagi kelangsungan hidup masyarakat baik saat ini atau dimasa yang akan datang.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu

daerah, potensi, dan keberadaannya dalam rangka menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹

Berdasarkan undang-undang otonomi daerah tersebut jelas bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengelola daerah seperti potensi dan kekayaan alam yang dimiliki. Serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaannya untuk kebutuhan masyarakat. Apalagi jumlah kekayaan yang dimiliki tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang dikhawatirkan akan menjadi persoalan baru bagi suatu daerah.

Sleman merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam yang cukup banyak. Penduduknya masih banyak yang bekerja di bidang pertanian, peternakan serta masih bergantung pada lahan, meskipun banyak dijumpai pabrik atau industri sebagai mata pencarian. Tak hanya lahan, namun masih banyak yang bergantung pada hasil hutan. Meskipun luas hutan di Sleman tidak banyak namun pemerintah sepertinya memperhatikan secara serius tentang perkembangan serta hasil yang diperoleh dari kehutanan. Apalagi keberadaan hutan sangat penting sebagai kawasan untuk menampung air hujan. Dengan ditampung air hujan juga memungkinkan mengurangi adanya kemungkinan banjir di suatu kawasan.

¹ *Undang-Undang Otonomi Daerah 2004*, Citra Umbara, Bandung, 2004, hal.165.

Sementara hutan yang dimiliki Sleman hanya berada dikawasan hutan Merapi saja.

Masalah hutan yang kini menjadi perhatian adalah kegiatan penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat. Kondisi tersebut bila dibiarkan saja dan tidak dicarikan jalan keluar maka akan berakibat pada kerusakan lingkungan yang berpotensi menyebabkan bencana. Diharapkan para penambang tidak menambang pasir dikawasan terlarang maupun kawasan hutan lindung.

Untuk menjaga Taman Nasional Gunung Merapi sebagai daerah resapan air, Dinas Pertanian dan Kehutanan Sleman terus melakukan upaya konservasi, antara lain melalui program perkemhan konservasi yang sudah berjalan dalam empat tahun terakhir. Dalam program ini, tiap tahunnya ditanam 25.000 batang tanaman untuk mengembalikan fungsi lereng Merapi sebagai daerah resapan air yang menjadi sumber pengaturan tata air bagi wilayah-wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.²

Perkebunan Kabupaten Sleman mempunyai produk unggulan diantaranya tembakau, kopi, mendong, minyak kayu putih serta nilam. Selain untuk mencukupi kebutuhan lokal, pruduk tersebut juga dipasarkan keluar daerah sleman. Misalnya saja mendong yang kemudian dikirim ke wilayah lain dalam bentuk setengah jadi maupun barang kerajinan tangan. Dari budi daya kopi, petani Sleman memproduksi "Bio Kopi" yakni kopi yang dibudidayakan secara alami di daerah lereng Merapi. Sleman juga memproduksi minyak putih atau dikenal dengan Virgin Coconut Oil (VCO), meskipun belum besar jumlahnya. VCO ini

terbuat dari kelapa yang diproses tanpa pemanasan. Produk sampingannya adalah gula kelapa, dan minyak kelapa.³

Peternakan Kabupaten Sleman mempunyai fungsi untuk menangani urusan dibidang produksi, penyuluhan, kesehatan hewan, serta penyebaran serta pengembangan hewan ternak. Pengembangan bidang peternakan di Kabupaten Sleman diarahkan pada ternak sapi potong, sapi perah, kambing/domba dan ternak unggas. Namun kini beternak babi juga mulai banyak dilakukan karena adanya permintaan serta keuntungan yang cukup besar yang bisa diperoleh oleh peternak dan hal tersebut juga legal untuk dilakukan.

Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman juga menangani masalah pengadaan dan pemantauan terhadap hewan ternak yang digunakan untuk hari raya Idul Adha atau kurban. Masalah yang kemudian timbul dari bidang peternakan Kabupaten Sleman ini adalah munculnya keresahan dari masyarakat untuk mengkonsumsi daging ternak. Misalnya saja adanya dugaan sapi gila dan antraks pada daging sapi yang dijual dipasaran. Yang terbaru adalah munculnya suspect virus flu burung di Kabupaten Sleman. Diawal tahun 2007, Yogyakarta digemparkan oleh munculnya penderita flu burung yang berasal dari salam, Magelang. Pasien tersebut bernama Qumilah (6 tahun) yang sebelumnya dirawat di RS Murangan Sleman. Namun kemudian pasien tersebut dipindahkan ke RS Sardjito. Karena terlambat mendapat penanganan pasien tersebut akhirnya meninggal dunia.⁴

³ Dinas Pertanian Dan Kehutanan Sleman : Detail Produk, www.slemankab.go.id.

Pengembangan usaha perikanan di Sleman disesuaikan dengan kondisi daerah. Prospek pengembangan usaha perikanan di Sleman terbuka lebar. Produksi ikan konsumsi di Yogyakarta sebagian besar yakni 70% berasal dari Kabupaten Sleman. Hal tersebut dikarenakan produksi ikan konsumsi di Sleman dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2004 produksi ikan konsumsi di Sleman mencapai 4.355,20 ton. Jumlah tersebut pada tahun 2005 meningkat menjadi 5.275,80 ton. Dan pada tahun 2006 produksi ikan konsumsi di Sleman bertambah menjadi 6.258,39 ton.⁵

Banyak masalah yang kini harus segera diselesaikan terkait dengan ruang lingkup kerja dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Hal yang paling mendasar dari masalah pertanian yaitu berkurangnya kawasan resapan hujan yang dimiliki Sleman. Kawasan tersebut berkurang karena didirikan bangunan yang mengakibatkan daerah resapan air hujan juga menipis. Badan Pusat Statistik Nasional menyebutkan bahwa secara nasional setiap tahun lahan sawah mengalami pengurangan karena alih fungsi lahan dan jumlah tersebut mencapai tidak kurang 100.000 Ha.⁶

Ancaman rawan pangan di DIY karena menyusutnya lahan pertanian di berbagai daerah di provinsi ini seperti dilontarkan Wagub Paku Alam IX, bisa menjadi kenyataan. Di Sleman saja, setiap tahun rata-rata 70 hektare tanah pertanian beralih fungsi. Padahal, Sleman adalah penyumbang padi terbesar di DIY. Dari data di Dinas Pertanian dan Kehutanan (Pertahanan) Kabupaten Sleman pada tahun 2005, luas lahan pertanian di Sleman 23.191 hektare. Namun,

⁵ www.slemankab.go.id

pada tahun 2006 berkurang menjadi 23.121 hektare. Penurunan jumlah luas lahan pertanian ini paling tinggi terjadi di Kecamatan Tempel.⁷

Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Sleman merupakan dinas yang terdiri dari bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan serta peternakan yang berada di kawasan Kabupaten Sleman. Dinas tersebut mewadahi semua kegiatan serta menangani masalah terkait persoalan mengenai bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan serta peternakan. Banyaknya ruang lingkup dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman tentu semakin banyak dan kompleks pula dengan masalah yang ditangani. Dengan demikian aparat Dinas pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dituntut untuk tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Apalagi masyarakat menengah kebawah yang bekerja sebagai petani, peternak maupun yang menggantungkan pada alam masih banyak jumlahnya.

Sebagai aparatur pemerintah, Dinas Pertanian dan Kehutanan harus mampu melaksanakan semua tugas serta kewajiban karena semua itu berdampak pada hasil kinerja dari dinas sendiri. Masukan, kritik serta apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus dapat ditampung. Sebagai organisasi publik Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman juga harus memiliki aspek-aspek yang mendukung kinerja diantaranya yaitu aspek responsivitas, produktifitas, profesionalisme, akuntabilitas, responsibilitas, dan aspek kualitas pelayanan.

Mengenai kinerja, dinas Pertanian dan Kehutanan terhambat pada masalah sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kelompok tani di tiap kecamatan.

Dengan jumlah kecamatan di Kabupaten Sleman yang berjumlah 17 tentu menyebabkan terhambatnya pelayanan dan menyebabkan tidak meratanya pelayanan yang diberikan. Hal tersebut apabila tidak diperhatikan dan dicarikan solusinya akan berakibat pada kerja dinas Pertanian dan Kehutanan yang tidak merata dalam memberikan pelayanan di tingkat kecamatan atau yang lebih kecil..

Oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri maka melalui instansi Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kabupaten Sleman dapat menangani masalah yang terkait dengan bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Karena dinas tersebut sebagai dinas yang sah dan terkait langsung sehingga mengetahui akar permasalahan dan solusi terbaik untuk masalah-masalah yang muncul.

Sehubungan dengan begitu banyak masalah yang muncul di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan serta kehutanan yang ada di Kabupaten Sleman maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisa Kinerja Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Sleman Tahun 2006-2007”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah sangat penting bagi suatu penelitian yang berguna untuk menjadikan penelitian tersebut sebagai penelitian yang terarah pada masalah tersebut. Dengan memperhatikan latar belakang masalah di depan

dan di belakang masalah maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

“ Bagaimana kinerja Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Sleman tahun 2006 – 2007 ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai kinerja Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Sleman ini bertujuan untuk :

- 1. Mengetahui kinerja Dinas Pertanian Dan Kehutanan di Kabupaten Sleman.**
- 2. Untuk mengetahui mekanisme kerja yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Sleman.**
- 3. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman.**

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1. Bagi penyusun, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan sebagai perbandingan antara teori-teori yang telah diterima dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada.**
- 2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pelayanan yang berkualitas serta kinerja dari pemerintah daerah.**
- 3. Agar menjadi wacana dan memberikan masukan pemikiran serta**

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Kerangka dasar teori tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi jelas dengan kerangka dasar pemikiran yang benar.

Menurut Koentjoroningrat :

“ Teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti di satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat “⁸

Menurut Masri Singarimbun :

“ Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi yang merupakan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara menghubungkan antar konsep “.

Menurut definisi ini, teori mengandung tiga hal yaitu :

- Pertama, teori adalah serangkaian proposisi atau konsep yang berhubungan.
- Kedua, teori adalah menerangkan secara sistematis suatu fenomena dengan cara menentukan hubungan antar konsep.
- Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.⁹

⁸ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hal. 9.

Dari sini kerangka dasar teori yang dijelaskan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan judul, yaitu :

1. Kinerja

Menurut WJS Purwodarminto :

“ Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya “. ¹⁰

Kinerja (performance) dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “the degree of accomplishment “ atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi (Keban, 2000). Semakin tinggi kinerja organisasi semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi. Jadi, suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja yang optimal, jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi para pemegang sahamnya. ¹¹

Menurut Drs. Faustino Cardoso G :

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai etika. ¹² Jadi, kinerja dapat diartikan seberapa jauh tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

¹⁰ Purwodarminto, WJS, *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal.643.

¹¹ Drs.Hessel Nogi S.Tangkilisan, M.Si, *Manajemen Modern Untuk Sektor Publik*, Balairung & Co, Yogyakarta, 2003, hal.1.

Penilaian terhadap kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan yang sangat penting bagi setiap organisasi karena penilaian tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dari penilaian tersebut, juga akan menjadi input untuk perbaikan serta peningkatan kualitas organisasi.

Untuk melihat keberhasilan kinerja dari suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

a. Menurut Lenvinne (1990) :

- i. *Responsiveness* atau responsivitas ini mengukur daya tangkap providers terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan customers.
- ii. *Responsibility* atau tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan public ini dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
- iii. *Accountability* atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake holders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.¹³

b. Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly (1990) :

- i. Kepuasan, artinya seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan anggotanya.
- ii. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan.
- iii. Produksi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungan.
- iv. Keadaptasian adalah ukuran yang menunjukkan daya tangkap organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungannya.
- v. Pengembangan adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan dan tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.¹⁴

Pengukuran kinerja aktivitas didisain untuk menilai bagaimana aktivitas tersebut dilaksanakan dan hasil yang diperoleh. Menurut Hatry dan Lavine, Kinerja atau prestasi yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek Produktivitas

Perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output).

Apabila keluaran atau hasil lebih besar dari pada masukan atau ongkosnya. Maka kondisi ini disebut efisien atau produktivitasnya tinggi.

¹⁴ Ibid, hal 177.

Namun bila keluaran lebih rendah dari pada masukannya, maka berarti organisasi tidak efisien.

2. Aspek Kualitas Pelayanan

Merupakan efektifitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi menyangkut aspek *quality services* (kualitas pelayanan).

3. Aspek Responsivitas

Merupakan daya tanggap dari para pengelola organisasi terhadap kebutuhan dan keinginan dari para klien atau masyarakat terhadap penerapan peraturan yang benar.

4. Aspek Responsibilitas

Dapat diartikan sebagai suatu kondisi administrasi dan kebijakan serta program-program yang baik yang dimiliki oleh organisasi sebagai kemantapan dan keahlian anggota pengelola organisasi.

5. Aspek Profesionalisme

Sikap suatu pekerjaan yang membutuhkan kompensasi atau keahlian teknis.

6. Aspek Akuntabilitas

Suatu pertanggungjawaban dari para pengelola organisasi tentang apa-apa yang telah dilakukan terhadap stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan), yang akan dinilai dan dievaluasikan oleh kalangan terkait atau kelompok kepentingan dengan organisasi itu.¹⁵

Untuk mencapai kinerja yang baik, aparat pemerintah seharusnya bisa memberikan tanggapan atau respon dalam bentuk tindakan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Apalagi dengan kemajuan teknologi dan kompleksnya permasalahan yang ada kini diperlukan aparat pemerintah yang professional untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

Dalam suatu organisasi atau instansi yang memiliki banyak anggota, kinerja setiap anggota dapat mempengaruhi kinerja organisasi atau instansi secara keseluruhan. Untuk mencapai kinerja yang berkualitas, maka kinerja dari para anggota yang terlibat dalam organisasi atau instansi tersebut perlu ditingkatkan terlebih dahulu. Oleh karena itu sebagai sebuah organisasi, Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Sleman harus memperhatikan aspek-aspek tersebut untuk mencapai kinerja yang maksimal. Serta mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Sleman sesuai dengan keadaan saat ini.

2. Organisasi Publik

Menurut Stoner organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama.¹⁶ Organisasi publik merupakan organisasi yang memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan serta menyediakan sarana dan prasarana kepada masyarakat tanpa bertujuan mencari keuntungan atau profit. Dalam hal ini, masyarakat sebagai konsumen menerima pelayanan dari pemerintah.

¹⁶ www.organisasi.com, *Pengertian, Definisi Dan Arti Organisasi Formal Dan Informal-Belajar Online Lewat internet Ilmu Manajemen*, 29 Juni 2006.

Organisasi publik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan organisasi pada umumnya. Yang membedakan yaitu sasaran tujuannya yaitu masyarakat secara luas. Secara umum terdapat dua variabel penyusunan organisasi yaitu variabel-variabel manusia dan variabel-variabel organisasi. Variabel-variabel organisasi sendiri mempunyai unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur inilah yang kemudian membedakan suatu organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Unsur-unsur tersebut adalah tujuan (goals), teknologi, dan struktur.

Menurut Clive Hoetam ciri-ciri organisasi publik adalah :

- a. Tidak dapat memilih konsumen
- b. Perannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Politik penginstitusi konflik.
- d. Pertanggungjawaban yang kompleks
- e. Sangat sering diteliti.¹⁷

Macam-macam organisasi adalah organisasi pemerintahan, organisasi bisnis dan organisasi sosial yang semuanya merupakan organisasi publik yang memberikan pelayanan secara luas kepada masyarakat. Organisasi publik tentu sangat berbeda dengan organisasi privat. Organisasi privat atau swasta biasanya dalam memberikan pelayanan lebih baik daripada pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik. Hal itu dikarenakan organisasi swasta lebih memperhatikan kualitas pelayanan, kepuasan dari konsumen, serta daya saing yang sehat. Namun tak jarang kini organisasi publik yang kini digunakan untuk ajang bisnis yang menghasilkan keuntungan.

Perbedaan sifat serta karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat sebagai berikut :

a. Tujuan organisasi

Sektor swasta bertujuan untuk memaksimalkan laba, sedangkan sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik tanpa motivasi mencari keuntungan.

b. Sumber pembiayaan

- Sektor publik : Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara dsb.
- Sektor swasta : pembiayaan internal, misalnya : modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal, misalnya : utang bank, obligasi, penerbitan saham.

c. Pertanggungjawaban

Organisasi sektor swasta bertanggung jawab kepada masyarakat (public) dan parlemen (DPR/DPRD). Sedangkan organisasi sektor swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham atau kreditor.

d. Struktur organisasi

Struktur organisasi pada sektor public bersifat birokratis, kaku dan hierarkis. Sedang struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel.

e. Karakteristik anggaran

f. Stakeholder yang mempengaruhi¹⁸

3. Pemerintah Daerah

a. Pemerintah Daerah

Berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 18 UUD 1945 dijelaskan bahwa Negara memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi daerah berdasar pada asas desentralisasi dalam mengatur pemerintahan daerahnya berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004. Dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah dan perangkat daerah. Perangkat daerah propinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah. Serta unsur

Pada umumnya dinas daerah meliputi :

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pendidikan
3. Dinas Pendapatan Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Dinas Keagamaan
7. Dinas Pekerjaan Umum
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pertambangan dan Energi
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
11. Dinas Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan
12. Dinas Pelestarian dan Lingkungan Hidup

b. Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai Dinas daerah

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dinas daerah merupakan unsur organisasi pokok dalam struktur administrasi dari cabang Eksekutif di bawah Presiden yang bertugas menyelenggarakan

masing. Dasar utama dibentuknya dinas daerah adalah diperlukannya suatu badan untuk menangani suatu urusan pemerintahan yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diatur mengenai dinas daerah sebagai berikut :

1. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
2. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris Daerah.
3. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan Bupati No. 27/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pertanian dan Kehutanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹⁹

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang

Tugas yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman yaitu melaksanakan kewenangan bidang pertanian dan kehutanan. Fungsi dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman yaitu :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan kehutanan
- Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan kehutanan
- Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis diras²⁰

F. Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para penulis untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial yang terjadi. Menurut Masri Singarimbun, *konsep adalah suatu unsur penelitian yang terpenting untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial maupun fenomena alam.*²¹ Secara umum dapat dikatakan bahwa definisi konsepsional dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman atau kesamaan terhadap masing-masing konsep yang terkandung dalam pengertian tersebut sesuai dengan judul yang diajukan, yaitu :

“ Analisis Kinerja Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Sleman tahun 2006 – 2007 ”

Agar tidak terjadi kekaburan penertian kiranya perlu dipaparkan batasan-batasan dari konsep-konsep yang akan dikemukakan dalam penelitian di lapangan.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pengertian atau penafsiran dari konsep-konsep tersebut.

1.Kinerja

Kinerja adalah usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.Organisasi publik

Organisasi publik adalah suatu lembaga pemerintahan yang melayani kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta tidak untuk mencari profit atau keuntungan semata.

3. Dinas Pertanian Dan Kehutanan

Dinas Pertanian Dan Kehutanan merupakan dinas yang membawahi bidang pertanian dan kehutanan, yang berfungsi menjalankan kegiatan serta kewenangan di bidang pertanian dan kehutanan sesuai cakupan bidang berdasar pada visi dan misi yang telah ada.

G.Definisi Operasional

Menurut Masri Singarimbun, definisi operasional adalah *suatu unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel,*

*keadaan lapangan, maka perlu ada batasan-batasan penelitian dengan menentukan indikator-indikatornya.*²²

Dalam definisi operasional ini mencakup indikator-indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran dalam penelitian. Indikator-indikator tersebut kemudian menjadi tolak ukur pelaksanaan kinerja Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Sleman dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Sleman. Terkait dengan penjabaran tersebut, maka indikator-indikator yang dibutuhkan penyusun dalam penelitian ini adalah :

1. Aspek Responsivitas

- Menanggapi kebutuhan dan keinginan masyarakat
- Susunan program yang terdapat di dalam rencana strategis

2. Aspek Produktifitas

- Usaha untuk pencapaian hasil
- Peningkatan kinerja

3. Aspek Profesionalisme

- Pengetahuan dan keahlian dari pegawai
- Kedisiplin
- Tingkat pendidikan pegawai

4. Aspek Akuntabilitas

- Kegiatan serta program yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi
- Pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

6. Aspek Kualitas Pelayanan

- Pola perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan
- Pelayanan yang tepat

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk melaksanakan penelitian yang digunakan untuk menyimpulkan fakta-fakta atau arsip-arsip untuk memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini metode penelitian meliputi :

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode dalam penelitian dimana meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi dalam system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²³

Terkait dengan permasalahan yang diangkat maka penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang apa yang telah dilakukan oleh dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Sleman terkait dengan kinerja serta peran

serta dalam masalah atau persoalan-persoalan yang muncul di wilayah Kabupaten Sleman.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Sleman khususnya pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Alasan dilakukannya penelitian di Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman karena banyaknya masalah pertanian dan ke

3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, sehingga informasi yang ada dijadikan sebagai acuan utama dalam penyusunan. Data primer tersebut diperoleh dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literature, yaitu dari buku-buku panduan, internet, media massa baik cetak maupun elektronik, arsip-arsip, dan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian

4. Unit Analisis Data

Berdasar pada permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, maka unit analisa dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mempelajari data yang mendukung penelitian yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menggunakan dokumen yang ada sebagai bahan literature yang didapat dari buku, jurnal, media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

b. Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan komunikasi aktif dengan petugas Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Sleman, serta beberapa orang yang terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Sleman.

c. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi sangatlah penting dalam melakukan

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif, menurut Winarto Surachmad dijelaskan sebagai berikut :

“ Sifat dari bentuk penelitian deskriptif kualitatif adalah memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau suatu proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.”²⁴

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dikualifikasikan , digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang terpisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atas dasar teori yang ada. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan dan data yang diperoleh harus diperhatikan validitas, reabilitas, dan obyektifitasnya.